



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

**Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Jl. Letkol Pol Toegino Komplek Perkantoran Kuala Tungkal**

KATA PENGANTAR

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mempunyai tugas mengkoordinir, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemantapan ketahanan pangan daerah.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanannya Aparatur Negara bahwa setiap instansi pemerintah setiap akhir tahun anggaran wajib menyusun LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada akhir tahun 2025 menyusun LKjIP.

LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selain sebagai kewajiban tersebut diatas, juga dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui Tingkat Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.
2. Sebagai bahan perbaikan kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa yang akan datang.

Demikian LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025 kami laporkan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Tungkal, Februari 2026

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

The image shows a blue ink signature over a circular official stamp. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNGPABUNG BARAT' around the perimeter. Below the signature, the name 'HAPRIANSYAH, S.St.Pi' and the NIP number 'NIP. 198012252009041002' are printed.

HAPRIANSYAH, S.St.Pi
NIP. 198012252009041002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi	1
C. Permasalahan Utama dari Organisasi	1
D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
E. Struktur Organisasi	5
F. Sumberdaya Manusia.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	9
B. Rencana Kerja Tahun 2025	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Analisis Capaian Kinerja	21
BAB IV PENUTUP.....	73

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rencana Kerja Tahun 2025	16
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	18
Tabel 3.1 Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja TA 2025	20
Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran Dinas Ketahanan Pangan TA 2025	21
Tabel 3.3 Kelompok Pangan menurut Konsumsi Kalori, Protein, Skor PPH Tahun 2025 Kab.Tanjung Jabung Barat.....	22
Tabel 3.4 Perbandingan capaian Skor PPH Konsumsi Masyarakat tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra tahun 2029.....	29
Tabel 3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Sasaran 1.....	31
Tabel 3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Anggaran) Sasaran 1.....	32
Tabel 3.7 Susunan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Tanjab Barat Tahun 2025.....	34
Tabel 3.8 Perbandingan capaian Skor PPH Ketersediaan tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra tahun 2029.....	36
Tabel 3.9 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Sasaran 2.....	45
Tabel 3.10 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Anggaran) Sasaran 2.....	46
Tabel 3.11 Perbandingan capaian Cadangan Pangan Kab. Tanjab Barat tahun 2025 Dengan target Akhir Renstra tahun 2029.....	49
Tabel 3.12 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Sasaran 3.....	51
Tabel 3.13 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Anggaran) Sasaran 3.....	52
Tabel 3.14 Evaluasi unsur IKM Dinas Ketahanan Pangan.....	55
Tabel 3.15 Nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan.....	56
Tabel 3.16 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Sasaran 4.....	59
Tabel 3.17 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Anggaran) Sasaran 4.....	61
Tabel 3.18 Ringkasan Penggunaan Anggaran Tahun 2025.....	64

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil perlu adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara bahwa setiap instansi pemerintah setiap akhir tahun anggaran wajib menyusun LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada akhir tahun 2025 menyusun LKjIP.

LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selain sebagai kewajiban tersebut diatas, juga dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui Tingkat Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.
2. Sebagai bahan perbaikan kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa yang akan datang.

Strategi Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan tahun 2025 – 2029 diarahkan untuk mencapai Tujuan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan 28 (Dua Puluh Delapan) Sub kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kerja Tahun 2025 untuk mencapai sasaran dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.389.941.585,- (Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dasar hukum pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pangan. Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek sasaran strategis organisasi yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan serta penanganan kerawanan pangan.
2. Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan keamanan pangan sega.
3. Meningkatnya cadangan pangan pemerintah
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah.

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Ada Beberapa Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan kondisi aktual yang mempengaruhi Ketahanan Pangan dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berbagai permasalahan terhadap pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, serta kemudahan untuk dikelola.

Isu strategis Dinas Ketahanan Pangan ini dirumuskan melalui Focus Grup Discussion (FGD) di internal Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1) Penguatan Cadangan Pangan

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

2) Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan

Potensi daerah rentan rawan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan terjadi bencana alam. Penanganan daerah rentan rawan pangan dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi serta adanya sinergitas lintas sektoral dalam penanganan daerah rentan rawan pangan.

3) Peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat ditunjukkan dengan angka skor Pola Pangan Harapan (skor PPH). Pola konsumsi masyarakat yang B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) masih relatif rendah sehingga perlu dilakukan percepatan penganeekaragam konsumsi pangan yang salah satu strateginya adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman pangan keluarga dan memperbanyak model pengembangan pangan pokok lokal, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menganeekaragamkan sumber karbohidrat dari beras ke jenis lain.

4) Peningkatan Keamanan Pangan Segar

Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan segar yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi dan fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan di masyarakat/ pelaku usaha. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun pelaku usaha terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

5) Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Isu stabilitas pasokan, harga pangan dan distribusi penting karena : (a) masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen, (b) harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentang terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen.

Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Kerja. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Bertugas membantu Bupati Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah di bidang pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok kepala dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh seorang sekretaris, sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

3. BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh kepala bidang. Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan kerawanan pangan, penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang, ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

4. BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang distribusi pangan, dan cadangan pangan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi, pemantauan dan evaluasi distribusi pangan dan pasokan harga, pengembangan kelembagaan distribusi pangan dan penyusunan prognosa neraca pangan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi cadangan pangan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran serta pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

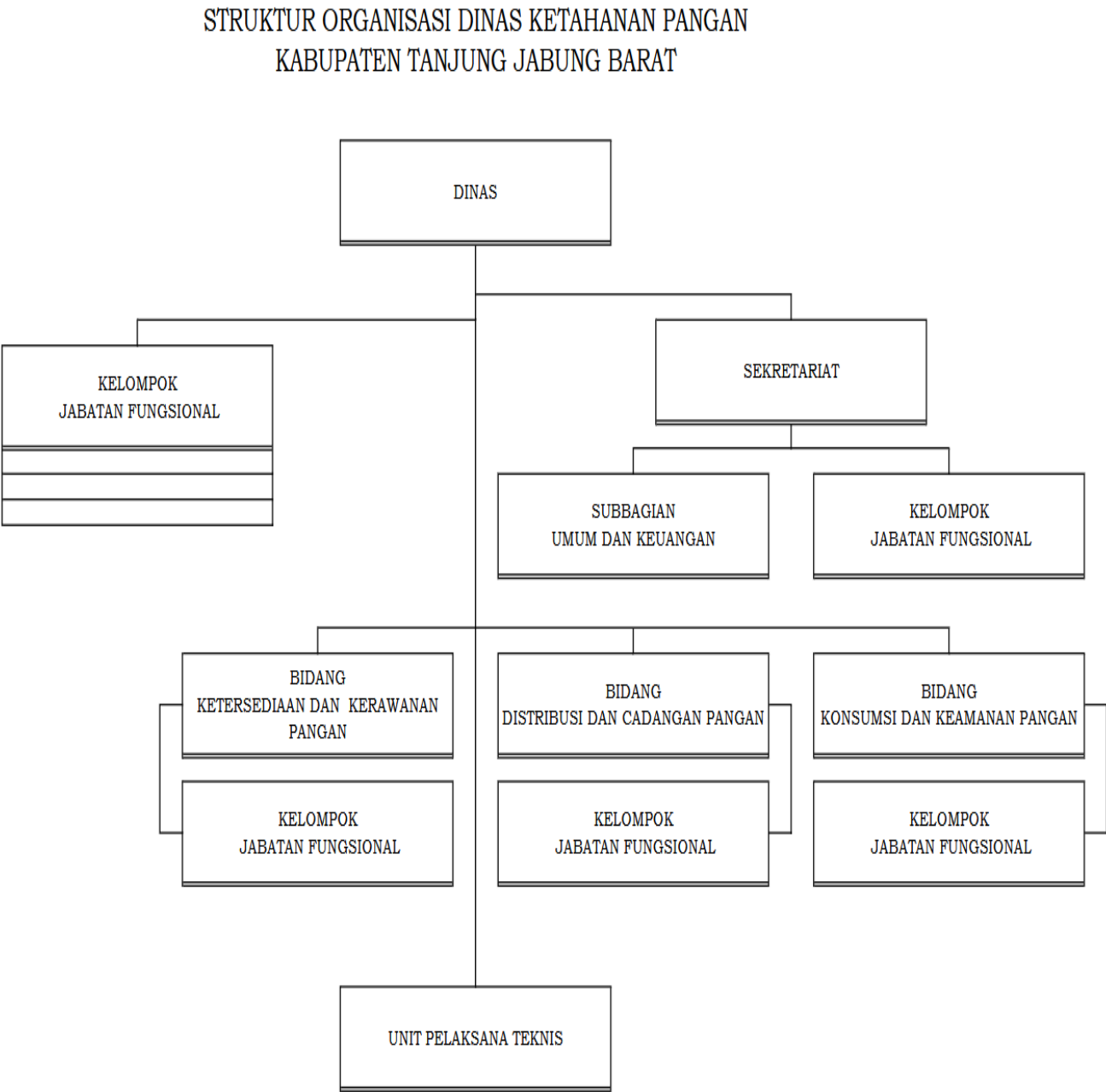
5. BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi promosi panganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, ketahanan pangan keluarga, perhitungan perkomoditas, perkonsumsi energi dan protein masyarakat pertahun, dan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan Pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. STRUKTUR ORGANISASI.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, maka telah disusun struktur organisasi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dapat dilihat pada bagan berikut ini :



F. SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan dalam tugas sangat tergantung pada sumber daya manusia aparatur sipil negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negera yang mempunyai integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Kebhinekaan.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pangan. Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat per 31 Desember 2025 sebanyak 31 orang, dengan klasifikasi berdasarkan golongan kepangkatan, serta pendidikan sebagai berikut :

- a. Golongan IV, sebanyak 6 Orang terdiri dari :
 - Golongan IV/a : 4 Orang
 - Golongan IV/b : 2 Orang
- b. Golongan III, sebanyak 10 Orang terdiri dari :
 - Golongan III/a : 2 Orang
 - Golongan III/c : 2 Orang
 - Golongan III/d : 6 Orang
- c. PPPK, sebanyak 15 Orang

Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Sarjana (S2), sebanyak 1 Orang
- b. Sarjana (S1), sebanyak 18 Orang
- c. Sarjana Muda (Diploma/DIII) sebanyak 2 Orang
- d. Sekolah Tingkat Menengah Sederajat sebanyak 10 Orang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Visi dan Misi pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Visi

“Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah Madani” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri dan Berinovasi)

2. Misi

Adapun Misi Bupati Tanjung Jabung Barat 2025 - 2029, dalam mencapai Visi sebagai berikut :

- 1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif.
- 2. Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
- 3. Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan

Dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kedalam misi ke tiga yaitu “Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan”

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

4. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui keberhasilan dari indikator- indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah (1) Meningkatnya cadangan pangan pemerintah, (2) Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan serta penanganan kerawanan pangan (3) Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan keamanan pangan segar, serta sasaran ke (4) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah.

5. Indikator

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagai berikut :

No.	Indikator	Target Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	100	100
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat	94,00	94,60	95,00	95,80	96,00
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	76,70	77,00	77,60	78,20	79,00
4	Nilai AKIP OPD	79,00	79,25	79,50	79,80	80,00
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00

6. Strategi, Kebijakan dan Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka ditetapkan strategi, arah kebijakan, dan program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Strategi

Strategi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 - 2029 adalah :

- a. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menyederhanakan proses, mengurangi beban birokrasi yang tidak perlu, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik. Sedangkan pengawasan internal yang efektif dengan melakukan Evaluasi kinerja secara berkala memuntuk bantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan sesuai rencana dan tidak ada penyimpangan.
- b. Penguatan Cadangan Pangan serta Mengembangkan kemitraan dengan daerah lumbung/ penghasil (champion), Kelompok Tani dan Gapoktan dalam rangka membangun Insfrastruktur pangan pendukung kemandirian pangan di Kab. Tanjung Jabung Barat.

- c. Kemandirian pangan adalah sebuah tujuan yang membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Pembangunan infrastruktur pangan dan penguatan cadangan pangan adalah bagian dari upaya tersebut, dan kemitraan dengan daerah lumbung dan kelompok tani merupakan kunci keberhasilan.
- d. Pengembangan Pengolahan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).
- e. Strategi pengembangan pengolahan pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) melibatkan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, khususnya melalui edukasi, pelatihan, dan pengembangan pangan lokal. Tujuannya adalah mendorong pola konsumsi yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan serta Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola konsumsi B2SA.
- f. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.
- g. Peningkatan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) sangat penting untuk menjamin kesehatan masyarakat. PSAT berpotensi mengandung cemaran kimia, biologis, atau benda asing yang dapat membahayakan, seperti residu pestisida, mikotoksin, atau logam berat. Pengawasan dilakukan melalui pengambilan dan pengujian sampel, sosialisasi, monitoring, serta pembinaan pelaku usaha.
- h. Pemberdayaan Masyarakat Pada Daerah Rentan Rawan Pangan serta Peningkatan stabilitas pasokan, harga pangan.
- i. Pemberdayaan masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan peningkatan stabilitas pasokan serta harga pangan dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti penguatan cadangan pangan, diversifikasi pangan, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat melalui korporasi usaha tani. Dengan mengintegrasikan berbagai strategi ini, pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama membangun ketahanan pangan yang lebih kuat dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi.

Kebijakan

Adapun rumusan arah kebijakan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang adalah :

1. Menerapkan pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan tujuan.
2. Optimalisasi dan Koordinasi Penyediaan infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan serta pengadaan cadangan pangan kabupaten
3. Optimalisasi kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
4. Koordinasi, sosialisasi dan pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
5. Optimalisasi intervensi kerawanan pangan dan gizi Berdasarkan Peta FSVA serta kegiatan gerakan pangan murah.

Program

Program Dinas Ketahanan Pangan umumnya fokus pada menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat. Program ini mencakup berbagai kegiatan, mulai dari penyediaan informasi harga pangan, pemantauan stok dan pasokan, hingga pengembangan kelembagaan usaha pangan dan diversifikasi konsumsi. Program Dinas Ketahanan Pangan yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya (Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024) yaitu :

a. *Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan*

Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan dapat mencakup aspek Pengembangan Infrastruktur yaitu Revitalisasi infrastruktur pangan seperti gudang beras, lantai jemur, dan rumah RMU beserta mesin RMU dan sarana pendukungnya untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi pangan. Tujuan dari program ini adalah Meningkatkan ketersediaan pangan yang cukup dan stabil serta Meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan kemandirian pangan nasional.

Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dapat meningkatkan ketersediaan pangan, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan kemandirian pangan nasional, sehingga Asta Cita Swasembada Pangan dapat tercapai. Adapun outcome dari program ini adalah meningkatnya pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan dengan indikator persentase jumlah cadangan pangan.

Adapun Kegiatan yang sesuai nomenklatur yang diatur dalam Permendagri adalah :

- 1) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Tujuan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dalam mendukung Asta Cita yaitu melaksanakan diversifikasi pangan masyarakat untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan bergizi. Adapun beberapa manfaat dari program ini adalah :

- Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan bergizi bagi masyarakat
- Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim, ekonomi, dan sosial
- Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan yang cukup dan bergizi.

Salah satu Asta Cita dari Presiden Republik Indonesia yang didukung oleh program ini adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Pengendalian Inflasi Daerah melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Outcome dari program ini adalah meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan.

Adapun Kegiatan yang sesuai nomenklatur yang diatur dalam Permendagri adalah :

- 1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- 2) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
- 3) Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
- 4) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
- 5) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
- 6) Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Tujuan Program Penanganan Kerawanan Pangan dalam mendukung asta cita yaitu Mengurangi kerawanan pangan masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan, perubahan iklim, dan bencana serta Meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan pangan bagi masyarakat yang rentan. Adapun beberapa manfaat dari program ini adalah :

- Mengurangi kerawanan pangan masyarakat yang rentan
- Meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan pangan bagi masyarakat yang rentan
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang rentan melalui akses pangan yang cukup dan bergizi

Salah satu Asta Cita dari Presiden Republik Indonesia yang didukung oleh program ini di Dinas Ketahanan Pangan adalah Penguatan SDM, Pendidikan, dan Kesehatan melalui kegiatan Genius (Gerakan Edukasi dan pemberian pangan bergizi untuk siswa) dengan Sosialisasi, Pemberian makanan tambahan, Lomba-lomba.

Outcome dari program ini adalah meningkatnya penanganan kerawanan pangan dengan indikator persentase daerah rentan rawan pangan. Adapun Kegiatan yang sesuai nomenklatur yang diatur dalam Permendagri adalah :

- 1) Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
- 2) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Tujuan Program Pengawasan Keamanan Pangan dalam mendukung asta cita yaitu Meningkatkan keamanan pangan bagi masyarakat dan Mengurangi risiko keracunan pangan dan penyakit yang terkait dengan pangan. Adapun beberapa manfaat dari program ini adalah :

- Meningkatkan keamanan pangan bagi masyarakat
- Mengurangi risiko keracunan pangan dan penyakit yang terkait dengan pangan
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan pangan

Salah satu Asta Cita dari Presiden Republik Indonesia yang didukung oleh program ini di Dinas Ketahanan Pangan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Pengawasan dan Keamanan Pangan. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan dengan indikator persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan. Adapun Kegiatan yang sesuai nomenklatur yang diatur dalam Permendagri adalah :

- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2025

Pada tahun anggaran 2025, rencana kerja tahunan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang dituangkan dalam bentuk program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kerja tahun 2025, dan telah menyesuaikan Indikator Kinerja dengan yang ada di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rencana Kerja Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja DKP	Dokumen	6
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan tahunan OPD yang disusun	Laporan	1
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	15
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan	Persen	100
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1
1.3.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan	Persen	100
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan OPD	Unit	11
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	11
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang pada Dinas Ketahanan Pangan (%)	Persen	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD Dinas Ketahanan Pangan	Persen	100
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	26
1.7.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	1
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat	Skor	94,00
2.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pangan Pokok (Beras) yang Disalurkan sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten (ton))	Ton	300
2.1.1	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	laporan	1
2.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan	1
2.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	laporan	2
2.2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah tonase pengadaan beras cadangan pangan kabupaten	Ton	6,6
2.2.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	Dokumen	1
2.2.2	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	10
2.2.3	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Ton	10
2.3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Konsumsi Energi (AKE) (kkal/kapita/hari)	Kkal/kap/hr	2.100
		Angka Kecukupan Konsumsi Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	Gr/kapita/hr	57
2.3.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	dokumen	1
2.3.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	laporan	2

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	%	32
3.1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan	Peta	1
3.1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1
3.2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan Prioritas 1,2,3 Peta FSVA	Desa	42
3.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Laporan	2
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	persentase keamanan sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang aman dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu	Persen	60
4.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi pengawasan keamanan pangan segar	Kegiatan	1
4.1.1	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Laporan	1
4.1.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan Bupati yang dituangkan didalam Sasaran Strategis sesuai dengan indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2025. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Dinas Ketahanan Pangan yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat. Berikut perjanjian kinerja tahun 2025 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Keberagaman Konsumsi Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat	94,00
2	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan serta penanganan kerawanan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	67,10
3	Meningkatnya cadangan pangan pemerintah daerah	Penguatan cadangan pangan Pemerintah Daerah	100 %
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan	75,00
		Nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan	81,00

Program	Anggaran	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp	4.060.601.845
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	697.481.720
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	277.349.000
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	28.030.000
TOTAL	Rp	5.063.462.565

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dilaksanakan guna mengukur atau untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam program, kebijakan, sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis 2021 – 2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Untuk menilai keberhasilan dan kurangberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja memiliki esensi penting dalam evaluasi kinerja yang berdasarkan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasi visinya.

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan asumsi sebagaimana digolongkan dalam tabel di bawah ini:

Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian
≥ 85%	Sangat Baik
70% sampai dengan < 85%	Baik
55% sampai dengan < 70%	Cukup
Kurang dari 55%	Kurang

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan diukur dengan cara **“Maximize Target”** yaitu apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Pencapaian dari sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut ini merupakan gambaran umum indikator perangkat daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD, serta Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penjelasan secara rinci mengenai metode penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Formulasi	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat	94,00	Skor PPH konsumsi : % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x Bobot masing-masing kelompok pangan	Semakin besar capain skor PPH Konsumsi, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik (Maximize Target)
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	67,10	Skor PPH ketersediaan : % Angka Kecukupan Energi (AKE) x Bobot masing-masing kelompok pangan	Semakin besar capain skor PPH Ketersediaan, maka semakin beragam ketersediaan pangan masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik (Maximize Target)
3	Penguatan cadangan pangan Pemerintah Daerah	100 %	(jumlah cadangan pangan kabupaten/Jumlah Penetapan Cadangan Beras Pemerintah sesuai perhitungan di Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023) x 100 %	Semakin besar capaian persentase Penguatan cadangan pangan kabupaten, maka semakin besar penguatan cadangan pangan kabupaten sehingga capaian kinerja semakin baik pula (Maximize Target)
4	Nilai (SAKIP) OPD	75,00	Hasil penilaian dari Inspektorat Tanjung Jabung Barat	Semakin besar capaian nilai AKIP maka tingkat akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan sangat baik, sehingga capaian kinerja semakin baik pula (Maximize Target)
	Nilai SKM Dinas Ketahanan Pangan	81,00	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Semakin besar capaian nilai IKM maka tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public Dinas Ketahanan Pangan sangat baik, sehingga capaian kinerja semakin baik pula (Maximize Target)

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Fisik (%)
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan keamanan pangan segar	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat	94,00	93,18	Capaian 99,13 % (sangat baik)
2	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan serta penanganan kerawanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	67,00	76,02	Capaian 113,46 % (Sangat Baik)
3	Meningkatnya cadangan pangan pemerintah daerah	Penguatan cadangan pangan Pemerintah Daerah	100 %	73,25 %	Capaian 73,25 % (Baik)
4	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan, dan akuntabilitas kinerja	a. Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan b. Nilai SKM Dinas Ketahanan Pangan	75,00 81,00	75,90 81,25	Capaian 101,2 % (Sangat Baik) Capaian 100,31 % (Sangat Baik)

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat, 2025

SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN MASYARAKAT DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR

1. Perbandingan Capaian/ Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 Terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja Renstra 2024	Realisasi				2025			Target Akhir Renstra 2029
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat	93,20	90,00	91,00	87,60	93,20	94,00	93,18	99,13	96,00

2. Analisis Capaian Kinerja

2.1 Perbandingan Target dan Kinerja Tahun Ini

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas konsumsi pangan adalah melalui skor PPH. Skor PPH Konsumsi didefinisikan sebagai proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan. Skor PPH Konsumsi dihitung dengan cara mengalikan persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan. Pola konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100.

Untuk menghitung Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat menggunakan rumus, sebagai berikut:

Skor PPH konsumsi : % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x Bobot masing- masing kelompok pangan

Tabel 3.3 Kelompok Pangan menurut Konsumsi Kalori, Protein, Skor PPH Tahun 2025
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

KELOMPOK PANGAN	Berat (gram/kap/hari)	Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	Konsumsi Protein (gram protein/kap/hari)	SKOR MAKS	SKOR PPH
	Mean	Mean	Mean	Mean	Mean
Padi-padian	261,01	1013,16	23,05	25,00	24,12
Umbi-umbian	45,17	52,26	,60	2,50	1,24
Pangan Hewani	150,23	276,15	24,14	24,00	24,00
Minyak dan Lemak	34,51	310,01	,03	5,00	5,00
Buah/Biji Berminyak	2,36	13,10	,19	1,00	,31
Kacang-kacangan	22,31	62,98	4,65	10,00	6,00
Gula	34,51	121,71	,47	2,50	2,50
Sayur dan Buah	239,69	138,16	5,00	30,00	30,00
Lain-lain	67,60	44,15	1,59	0,00	0,00
TOTAL	857,40	2031,67	59,71	100,00	93,18

Sumber : Susenas BPS, 2025

Untuk perhitungan Skor PPH konsumsi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat di tahun 2025 berdasarkan survey sosial ekonomi nasional (susenas) oleh BPS, dari proses penghitungan data oleh bidang konsumsi dan keamanan pangan, didapatkan skor PPH sebesar 93,18. Nilai skor PPH konsumsi masyarakat tahun 2025 ini hampir sama dibandingkan dengan skor PPH tahun 2024 yang lalu yaitu sebesar 93,20. Berdasarkan data SUSENAS menunjukkan nilai skor dari masing masing kelompok pangan pada tabel diatas, dimana masyarakat tanjung jabung barat mengkonsumsi padi padian 261,01 gram perhari danmenghasilkan skor PPH 24,12 pada kelompok padi padian, angka tersebut masih dibawah skor maksimal PPH. Sedangkan pada kelompok umbi umbian berdasarkan Susenas maret 2025 skor PPH yang di capai 1,24 angka ini masih dibawah skor maksimal sebesar 2,50 dengan konsumsi umbi umbian masyarakat tanjung jabung barat rata rata 45,17 gram per orang perhari. Namun di antara kelompok pangan tersebut masih ada kelompok pangan yang memenuhi angka maksimal skor PPH di antaranya pangan hewani, minyak dan lemak, serta sayur dan buah buahan.

Dengan kondisi saat ini menunjukkan keberagaman konsumsi pangan masyarakat masih masih bisa ditingkatkan, dimana masih tingginya konsumsi kelompok pangan hewani dan beras namun masih rendah pada konsumsi buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Buah/biji berminyak, kacang-kacangan, dan umbi-umbian merupakan bahan pangan penting yang kaya nutrisi dan memberikan berbagai manfaat kesehatan bagi manusia, mulai dari sumber energi utama hingga pencegah penyakit kronis.

Walaupun demikian, masih ditemui berbagai faktor hambatan di masyarakat dalam mendukung tercapainya target ditahun 2025 antara lain :

- a) Perilaku masyarakat yang masih merasa belum makan jika belum makan nasi.
- b) Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam, bergizi, seimbang, dan masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan
- c) Kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu

- d) Berbagai bentuk olahan pangan lokal belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat dan masih dianggap bahan pangan inferior.
- e) Belum optimalnya kerjasama antar OPD serta lemahnya partisipasi masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, perlu terus didukung dengan upaya mempercepat terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang melalui :

- a) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) melalui komunikasi, informasi, edukasi (penyusunan KIT dan modul penyuluhan di tingkat lapangan, lomba cipta menu B2SA, serta penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik
- b) Upaya penurunan konsumsi beras dilakukan dengan meningkatkan produksi serta konsumsi pangan karbohidrat berbasis sumberdaya lokal
- c) Peningkatan konsumsi melalui buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan umbi-umbian yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga.

Upaya diatas merupakan daya ungkit yang cukup besar untuk dapat meningkatkan skor PPH Konsumsi masyarakat khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.2 Perbandingan Realisasi Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir

Skor maksimal PPH konsumsi adalah 100, semakin tinggi skor PPH maka konsumsi pangan penduduk semakin beragam dan memenuhi kaidah gizi seimbang. Keragaman konsumsi pangan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 5 tahun terakhir mengalami tren peningkatan. Hal ini diindikasikan dengan meningkatnya skor PPH Konsumsi pada kurun waktu tahun 2021-2022. Meskipun mengalami trend yang meningkat, namun pada tahun 2021-2022 skor PPH Konsumsi masih berada di bawah capaian target RPJMN ditahun 2022 sebesar 92,90. Sebaliknya pada tahun 2023 capaian skor PPH Konsumsi turun 3,4 poin dibandingkan tahun sebelumnya seb. Untuk Capaian Skor PPH pada tahun 2024 dan 2025 kembali meningkat menjadi skor tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Peningkatan skor PPH sudah mendekati levelling off (trend menuju stagnan). Capaian skor PPH tiap tahun dipengaruhi oleh berbagai faktor: pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, inflasi/daya beli, program panganekaragaman pangan dan Peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan sikap masyarakat mengenai perlunya mengkonsumsi Pangan B2SA;

Nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) diukur agar dapat digunakan sebagai basis data untuk mengetahui angka kebutuhan pangan dalam perencanaan pembangunan pangan berdasarkan potensi dan kearifan lokal. Kualitas konsumsi pangan menjadi salah satu indikator global dan nasional untuk menilai pemenuhan konsumsi pangan berdasarkan standar kecukupan gizi. Skor PPH yang ideal perlu dihitung dengan cermat agar kebijakan dalam mengambil langkah strategis juga tepat. Proyeksi skor PPH pada setiap kelompok pangan maupun secara total perlu dilakukan setiap tahun.

2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Ketahanan Pangan. Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu pada tabulasi target jangka menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2025 s/d 2029, sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Untuk perbandingan realisasi capaian kinerja Skor PPH Konsumsi tahun 2025 ini dibanding dengan target pada akhir periode Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan capaian Skor PPH Konsumsi Masyarakat tahun 2025 dengan target Akhir Renstra tahun 2029

Uraian	2025		2029
	Target	Realisa	Target
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat	94,00	93,18	96,00

Sumber : Data BPS diolah Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025, realisasi Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Masyarakat yaitu 93,18 dan jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2029, maka capaian targetnya sebesar 997,06 % atau dapat dikategorikan sangat baik.

Guna mencapai target realisasi skor PPH ditahun 2029 perlu digencarkan salah satunya melalui sosialisasi kegiatan gerakan pangan non beras non terigu, beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) kepada masyarakat khususnya siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah serta para guru dan kepala sekolah. Sosialisasi ini sangat penting, bahwa pangan itu bukan hanya beras dan terigu sebagai sumber karbohidrat, tapi terdapat jenis pangan lain seperti jagung, sagu, singkong, ubi jalar, sukun, sorghum, serta umbi-umbian lain. Gerakan sosialisasi konsumsi pangan lokal non beras kepada para siswa SD/MI kelompok usia anak-anak, sehingga saat dewasa sudah terbiasa mengkonsumsi makanan non beras dan non tepung terigu.

Program kegiatan gerakan pangan non beras non terigu, beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA), membutuhkan waktu untuk mengubah perilaku masyarakat agar beralih mengonsumsi pangan ke bahan pangan non beras dan non terigu. Keterlibatan pemangku kepentingan antara lain para pelaku UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan turut mendukung gerakan tersebut dengan menciptakan kreasi masakan berbahan non beras dan terigu, seperti dari talas, singkong dan jagung, sehingga nantinya akan muncul kuliner dari bahan jagung, sagu, singkong, ubi jalar, sukun, sorghum, serta umbi-umbian lain.

Menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui: 1) Peningkatan aktivitas fisik; 2) Peningkatan perilaku hidup sehat; 3) Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi; 4) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit; 5) Peningkatan kualitas lingkungan; dan 6) Peningkatan edukasi hidup sehat.

Program perbaikan konsumsi pangan harus diawali sejak aspek hulu yakni ketersediaan pangan, distribusi pangan, hingga hilir yaitu konsumsi pangan. Upaya perbaikan konsumsi pangan harus dilakukan bersama-sama oleh SKPD terkait bersama dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat maupun media dengan peran masing-masing. Bappeda berperan sebagai pengawal program/kegiatan yang tercantum dalam RKPD/Renja masing-masing SKPD sedangkan Dinas Ketahanan Pangan berperan sebagai focal point yaitu SKPD kunci.

2.4 Analisis Capaian Kinerja Program Pendukung Pencapaian Indikator Sasaran Strategis

Adapun sub kegiatan yang menjadi pendukung dalam pencapaian target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi masyarakat pada tahun anggaran 2025 yaitu :

➤ *Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun*

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan melakukan kegiatan Pelatihan Survei Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) dengan menghadirkan tiga narasumber analisis yakni Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat H. Yan Ery, S.Pt., M.Si, Kabid Konsumsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Ibu Hj. Nelli Rosmawati, S.P., M.Si dan Ibu Aan Jumlianti, S.P selaku Kasi Konsumsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dapat menjadi salah satu capaian kinerja serta indikator capaian target kualitas konsumsi pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat maupun secara nasional, hal tersebut dapat tercapai apabila kabupaten memiliki capaian konsumsi pangan yang berkualitas mengarah pada pola komposisi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA). Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diketahui skor PPH yang telah dihitung dan dapat diperoleh data yang valid untuk bisa dilakukan evaluasi, perencanaan, serta eksekusi untuk menjadi solusi dalam problem ketahanan pangan kedepannya.

Berikut beberapa dokumentasi dari sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun



➤ Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Sebagai sub kegiatan pendukung pencapaian skor pola pangan harapan konsumsi masyarakat, kegiatan pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam dan bergizi, Meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan lokal yang beragam dan berkelanjutan, Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengkonsumsi pangan yang beragam dan bergizi.

Bentuk dari sub kegiatan ini adalah pemberian hibah berupa benih tanaman dan Sarana Produksi Pertanian (Saprodi) dan juga Pelatihan bimbingan teknis kelompok untuk menambah wawasan Pengolahan Lahan Tanaman Hortikultura serta Penanganan Hama dan Penyakit Pada Tanaman Hortikultura kepada 4 Kelompok Wanita Tani yaitu KWT KWT Mawar Merah Desa Suak Labu Kec. Kuala Betara, KWT Lestari Bunda Desa Sungai Dungun Kec. Kuala Betara, KWT Vanila Desa Tungkal IV Desa Kec. Seberang Kota dan KWT Mekar Bunga Desa Mekar Tanjung Kec. Bram Itam.

Selain pemberian hibah kepada Kelompok wanita tani ini, dilaksanakan juga kegiatan pelatihan pengolahan pangan lokal.

Berikut beberapa dokumentasi dari sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal







➤ Koordinasi dan Sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

Penjaminan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dilakukan melalui pengawasan pre market dan postmarket. Pengawasan pre market dilakukan untuk memberikan jaminan terhadap keamanan dan mutu pangan yang beredar. Pengawasan post market dilaksanakan melalui pengawasan label dan kemasan, pengambilan contoh serta pengujian. Pangan segar dapat dikategorikan aman apabila pangan tersebut memenuhi persyaratan keamanan pangan, baik dari aspek cemaran pangan dan penerapan sanitasi hygiene oleh pelaku usaha pangan.

Persyaratan keamanan pangan dari aspek cemaran atau residue mengacu pada peraturan atau standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pengujian keamanan pangan pada tahun 2025 dilakukan sebanyak 25 sampel di 5 (lima) pasar kecamatan maupun SPPG Makan Bergizi Gratis (MBG). Sampel tersebut diuji menggunakan Rapid Test Kit. Masih terbatasnya anggaran Dinas Ketahanan Pangan dalam pengadaan Rapid Test Pengujian ini juga berpengaruh dalam pengambilan sampel, sehingga diharapkan untuk tahun kedepan agar ada anggaran yang cukup untuk membeli alat rapid test kit untuk pengujian sampel Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT) sehingga semua kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menjadi bagian dari pengambilan sampel PSAT.

Adapun 5 lokasi pengambilan sampel PSAT di Tahun 2025 yaitu dilakukan di :

- Kecamatan Senyerang (Semangka, Bawang Merah, Terong, Cabe Merah, dan Tomat)
- Kecamatan Pengabuan (Bawang Putih, Terung Bulat, Cabe Rawit, Terung Ungu, dan Buncis)
- Kecamatan Betara (Bawang Merah, Wortel, Kacang Panjang, Buah Pir, dan Anggur)
- Kecamatan Bram Itam (Bawang Putih, Brokoli, Cabe, Apel, dan Anggur Ungu)
- Kecamatan Tungkal Ilir di SPPG MBG (Bawang Merah, Mentimun, Wortel, Sawi, dan Anggur)

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai kewenangan untuk menerbitkan PSAT produksi dalam negeri usaha kecil (PD-UK). Untuk Tahun 2025 menerbitkan 2 (Dua) Registrasi PDUK yaitu untuk komoditi beras dengan rincian sebagai berikut :

- a. Registrasi atas nama FAUZI dengan alamat Dusun Beringin Desa Kempas Jaya Kecamatan Senyerang.
- b. Registrasi atas nama SUYOTO dengan alamat Parit Malikus Kelurahan Senyerang Kecamatan Senyerang.

Berikut beberapa Dokumentasi Pengambilan sampel , pengujian sampel keamanan Pangan





3. Analisis Terhadap Faktor Hambatan, Faktor Keberhasilan dan Solusi

Pengukuran Pencapaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2025 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Analisis	Solusi
1	Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan keamanan pangan segar	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat	94,00	93,18	99,12%	Masih tingginya konsumsi jenis pangan beras dimasyarakat serta pengaruh dari tingkat pendapatan masyarakat	Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sangat baik. Indikator Sasaran I (pertama) berupa Skor PPH konsumsi masyarakat tingkat capaiannya %, hal tersebut karena adanya program pemerintah terkait diversifikasi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) dan semakin kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Untuk perhitungan Skor PPH konsumsi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat di tahun 2025 berdasarkan survey social ekonomi nasional (susenas) oleh BPS, dari proses penghitungan data oleh bidang konsumsi dan keamanan pangan, didapatkan skor PPH sebesar 93,18. Nilai skor PPH konsumsi masyarakat tahun 2025 ini hampir sama dibandingkan dengan skor PPH tahun 2024 yang lalu yaitu sebesar 93,20. Dengan kondisi saat ini menunjukkan keberagaman konsumsi pangan masyarakat masih masih bisa ditingkatkan, dimana masih tingginya konsumsi kelompok pangan hewani dan minyak/lemak namun masih rendah pada konsumsi gula, buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan umbi-umbian.

Walaupun demikian, masih ditemui berbagai faktor hambatan di masyarakat dalam mendukung tercapainya target ditahun 2025 antara lain :

- a) Perilaku masyarakat yang masih merasa belum makan jika belum makan nasi.
- b) Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam, bergizi, seimbang, dan masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan
- c) Kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu
- d) Berbagai bentuk olahan pangan lokal belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat dan masih dianggap bahan pangan inferior.
- e) Belum optimalnya kerjasama antar OPD serta lemahnya partisipasi masyarakat.

Beberapa solusi yang mungkin dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, perlu terus didukung dengan upaya mempercepat terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang melalui :

- a) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) melalui komunikasi, informasi, edukasi (penyusunan KIT dan modul penyuluhan di tingkat lapangan, lomba cipta menu B2SA, serta penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik
- b) Upaya penurunan konsumsi beras dilakukan dengan meningkatkan produksi serta konsumsi pangan karbohidrat berbasis sumberdaya lokal
- c) Peningkatan konsumsi melalui buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan umbi-umbian yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga.

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Sasaran Strategis

Tabel 3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Anggaran) Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan keamanan pangan segar	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat	94,00	93,18	99,12%	306.373.320	265.002.830	86,49 %	114,60

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara capaian kinerja dan anggaran, maka dapat dilihat pada tabel 3.17 bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerjaIndikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi masyarakat dengan capaian kinerja 99,12% dan capaian anggaran 86,49% menunjukan tingkat efisiensi anggaran sebesar 114,60 % dengan capaian kinerja yang sudah mencapai target yang ditentukan yaitu baik.

Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi masyarakat	94,00	93,18	99,12	Menunjang
Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Konsumsi Energi (AKE)	2.100 kkal/kap/hr	2.031,67 kkal/kap/hr	96	Menunjang
	Angka Kecukupan Konsumsi Protein (AKP)	57 gr/kap/hr	59,71 gr/kap/hr	104	Menunjang
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	60 %	60 %	100	Menunjang
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi pengawasan keamanan pangan segar	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125	Menunjang

Sasaran 1 : Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan keamanan pangan segar, Dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat,

ditunjang dengan program :

- a. **Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, dengan kegiatan yang menunjang kinerja program yaitu *kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi*.

Dalam kegiatan ini terdapat indikator 1) Angka Kecukupan Konsumsi Energi (AKE) dengan target 2.100 kkal/kap/hari telah terealisasi 2.031,67 kkal/kap/hari, dan indikator 2) Angka Kecukupan Konsumsi Protein (AKP) dengan target 57 gr/kap/hari telah terealisasi 59,71 gr/kap/hari atau rata2 persentase target kegiatan tercapai 100 % sangat mendukung terlaksananya keberagaman konsumsi masyarakat.

Indikator kinerja kegiatan tersebut diatas didukung oleh 2 Sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun, dengan pagu anggaran Rp. 22.536.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 18.358.050,-
- 2) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dengan pagu anggaran Rp. 255.807.320,- dengan realisasi anggaran Rp. 246.664.780,-

- b. **Program Pengawasan Keamanan Pangan**, dengan kegiatan yang menunjang kinerja program yaitu *Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota*

Dalam kegiatan ini terdapat indikator Jumlah frekuensi pengawasan keamanan pangan segar dengan target 4 kegiatan telah terealisasi 5 kegiatan tersebut, atau realisasi tercapai 100 %.

Indikator kinerja kegiatan tersebut diatas didukung oleh 2 Sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan pagu anggaran Rp.11.500.000,- dengan realisasi anggaran 11.499.600,-
- Koordinasi dan Sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan, dengan pagu anggaran 16.530.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 14.344.700,-

SASARAN STRATEGIS 2 : MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN KETERJANGKAUAN PANGAN SERTA PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

1. Perbandingan Capaian/ Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 Terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja Renstra 2024	Realisasi				2025			Target Akhir Renstra 2029
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	76,39	89,55	80,51	69,11	76,39	67,00	76,02	113,46	79,00

2. Analisis Capaian Kinerja

2.1 Perbandingan Target dan Kinerja Tahun Ini

Untuk menghitung Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan menggunakan rumus, sebagai berikut:

Skor PPH ketersediaan : % Angka Kecukupan Energi (AKE) x Bobot masing-masing kelompok pangan

Berdasarkan neraca bahan makanan (NBM) kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025, maka pola pangan harapan (PPH) tingkat ketersediaan kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan AKE sebesar 2.400 Kkal/kapita/hari (WNPG X 2012) dapat disusun seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Susunan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

No	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1.	Padi-padian	626	26,1	0,5	13,04	13,04	25,0	+
2.	Umbi-umbian	56	2,3	0,5	1,16	1,16	2,5	-
3.	Pangan Hewani	3.555	148,1	2,0	296,29	24,00	24,0	+
4.	Minyak dan Lemak	1.496	62,4	0,5	31,18	5,00	5,0	+
5.	Buah/biji berminyak	845	35,2	0,5	17,59	1,00	1,0	+
6.	Kacang-kacangan	1	0,0	2,0	0,06	0,06	10,0	-
7.	Gula	84	3,5	0,5	1,75	1,75	2,5	-
8.	Sayuran dan buah	859	35,8	5,0	178,94	30,00	30,0	+
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	7.522	313,4		540,02	76,02	100,0	-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat (2025)

Berdasarkan tabel skor PPH Ketersediaan yang dicapai Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 adalah 76,02 masih jauh dibawah dari skor PPH ideal yang diharapkan secara nasional yaitu skor 100, semakin mendekati skor 100, maka proporsi energi dan zat gizi lainnya akan semakin beragam dan seimbang. Bila dilihat dari skor riil yang dihasilkan ketersediaan energi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 540,02 sudah melampaui skor PPH ideal nasional, namun proporsi keseimbangan energi dari kelompok bahan pangan didasarkan skor maksimal nasional tidak berimbang sehingga tidak memenuhi kebutuhan energi dan gizi yang diharapkan.

Tabel diatas juga memperlihatkan bahwa kelompok kelompok pangan yang memiliki skor aktual lebih rendah dari pada skor PPH perlu dilakukan peningkatan produksi. Penurunan tersebut dapat dilakukan dengan membuat diversifikasi produk olahan turunan sehingga dapat meningkatkan nilai tawar dan dapat dipasarkan keluar Kota Malang. Sementara untuk peningkatan komoditas kelompok pangan dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah produksi atau bila tidak memungkinkan untuk meningkatkan jumlah produksi dalam daerah maka bisa melakukan peningkatan impor pangan dari daerah lain

Dari 9 (Sembilan) kelompok bahan pangan sebagai komponen penyusun PPH, tiga kelompok bahan pangan yang telah memenuhi bahkan sangat signifikan melampaui skor PPH maksimal yaitu kelompok pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, serta sayuran dan buah sedangkan kelompok bahan pangan lainnya masih belum mampu untuk mencapai skor PPH maksimal yang diharapkan.

Kelompok padi-padian belum mencapai skor PPH maksimal tetapi sudah hampir mendekati. Beras yang merupakan penyumbang energi terbesar kelima pada kelompok ini menjadi tumpuan agar dapat mencapai skor maksimal, hal ini cukup beralasan mengingat potensi Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu sentra beras di Provinsi Jambi tentunya berpeluang untuk peningkatan produksi beras lebih maksimal. Untuk kelompok umbi-umbian skor PPH yang dicapai hanya 1,66 masih terlalu kecil untuk mencapai skor PPH maksimal sebesar 2,5, ubi kayu merupakan penyumbang energi terbesar pada kelompok ini yakni sebesar 56 Kkal/kapita/hari sedangkan ubi jalar hanya 5 Kkal/kapita/hari, dua komoditi ini masih berpotensi memberikan kontribusi terhadap pencapaian skor PPH maksimal terutama peningkatan produksi ubi kayu.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagian wilayahnya meliputi daerah perairan yang tentunya berpeluang sebagai penghasil/penyedia komoditi ikan, begitu pula masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani yang juga berpeluang sebagai penghasil komoditi peternakan, pada tabel 3.4 menunjukkan skor PPH dari kelompok pangan hewani sebesar 24,0 sudah menyentuh skor PPH yang dianjurkan yakni 24,0. Pada kelompok pangan hewani, ikan menyumbang ketersediaan energi sebesar 52 Kkal/kapita/hari, daging 227 Kkal/kapita/hari, dan telur sebesar 3.295 Kkal/kapita/hari, dengan persentase AKE 148,1 dari AKE total sehingga mampu untuk mencapai skor PPH maksimal.

2.2 Perbandingan Realisasi Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir

Memperhatikan tabel Neraca Bahan Makanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana skor PPH Ketersediaan yang cenderung menurun tiap tahun menunjukkan bahwa Potensi produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan dan perikanan harus segera dioptimalkan lagi oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Meski demikian masih ada beberapa komoditi pangan strategis yang diperoleh dari luar daerah seperti tepung terigu, tepung gandum, gula pasir, kacang kedelai, kentang, daging ayam kampung, susu sapi, telur ayam kampung, serta minyak goreng. Pangan strategis yang tidak dapat di produksi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau produksinya rendah ini perlu dijaga kestabilan pasokan pangannya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu menjamin dan menjaga pasokan pangan strategis yang stabil dari berbagai daerah sekitar.

Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan ketersediaan energi dan protein serta PPH ketersediaan antara lain:

- a. Peningkatan ketersediaan kelompok pangan hewani, yaitu daging, telur, susu dan ikan dari produksi dalam negeri.
- b. Peningkatan produksi dan konsumsi sumber pangan hewani alternatif seperti daging ayam, telur, dan ikan yaitu berupa kacang-kacangan.
- c. Mengoptimalkan produksi sumber alternatif dari padi-padian yang berasal umbi umbian perlu terus dioptimalkan.
- d. Peningkatan produksi kelompok sayur dan buah, dengan mengoptimalkan lahan yang tersedia, seperti lahan marginal, ruang terbuka, dan pekarangan sesuai potensi sumber daya lokal.

2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Untuk perbandingan realisasi capaian skor pola pangan harapan (PPH) Ketersediaan daerah tahun 2025 ini dibanding dengan target pada akhir periode Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8 Perbandingan capaian Skor PPH Ketersediaan tahun 2025 dengan target Akhir Renstra tahun 2029

Uraian	2025		2029
	Target	Realisasi	Target
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	67,00	76,02	79,00

Sumber : Dinas Instansi Terkait diolah Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat

Dalam Prasetyarini dkk (2014), dijelaskan bahwa Skor PPH < 100 artinya tidak ideal dimana kualitas ketersediaan pangan masih rendah. Berdasarkan dengan pernyataan tersebut dan melihat skor PPH Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 masih dibawah 100 maka perlu adanya peningkatan keberagaman atau diversifikasi pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam mencapai skor PPH yang ideal, maka kelompok pangan yang melebihi skor PPH maksimal, PPH sebaiknya dilakukan pengolahan produk turunan sedangkan kelompok pangan yang memiliki skor aktual lebih rendah dari pada skor PPH perlu dilakukan peningkatan produksi. Penurunan tersebut dapat dilakukan dengan membuat diversifikasi produk olahan turunan sehingga dapat meningkatkan nilai tawar dan dapat dipasarkan keluar Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sementara untuk peningkatan komoditas kelompok pangan dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah produksi atau bila tidak memungkinkan untuk meningkatkan jumlah produksi dalam daerah maka bisa melakukan peningkatan impor pangan dari daerah lain.

Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan ketersediaan energi dan protein serta PPH ketersediaan antara lain: (a) Peningkatan ketersediaan kelompok pangan hewani, yaitu daging, telur, susu dan ikan dari produksi dalam negeri. (b) Peningkatan produksi dan konsumsi sumber pangan hewani alternatif seperti daging ayam, telur, dan ikan yaitu berupa kacang-kacangan. (c) Mengoptimalkan produksi sumber alternatif dari padi-padian yang berasal umbi umbian perlu terus dioptimalkan. (d) Peningkatan produksi kelompok sayur dan buah, dengan mengoptimalkan lahan yang tersedia, seperti lahan marginal, ruang terbuka, dan pekarangan sesuai potensi sumber daya lokal.

Selain itu Dengan berbagai upaya penyediaan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan mengoptimalkan penganekaragaman pangan, meningkatkan kemampuan penyediaan bahan pangan pokok selain beras untuk dapat memenuhi konsumsi pangan yang beragam, memfasilitasi dan dukungan kebijakan bagi pengembangan industri pengolahan bahan pangan lokal serta infrastruktur pemasaran untuk meningkatkan ketersediaan pangan bagi masyarakat, meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang keunggulan produk pangan lokal dan pola konsumsi hidup sehat dengan memanfaatkan potensi sumber pangan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta meminimalisir tingkat kehilangan hasil produksi melalui penanganan pascapanen pada proses penggilingan dan transportasi.

2.4 Analisis Capaian Kinerja Program Pendukung Pencapaian Indikator Sasaran Strategis

Adapun sub kegiatan yang menjadi pendukung dalam pencapaian target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pada tahun anggaran 2025 yaitu :

➤ Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

Langkah-langkah Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat dalam melakukan penyusunan Neraca Bahan Makanan yaitu :

- 1. *Pengumpulan data* : Mengumpulkan data tentang produksi, impor, ekspor, dan stok bahan makanan.
- 2. *Penghitungan ketersediaan* : Menghitung ketersediaan bahan makanan dengan menggunakan rumus: Ketersediaan = Produksi + Impor - Ekspor +/- Stok.
- 3. *Penghitungan kebutuhan* : Menghitung kebutuhan bahan makanan berdasarkan jumlah penduduk, pola konsumsi, dan kebutuhan gizi.
- 4. *Analisis neraca* : Menganalisis neraca bahan makanan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan bahan makanan.
- 5. *Identifikasi defisit/surplus* : Mengidentifikasi apakah ada defisit atau surplus bahan makanan di wilayah atau negara tersebut.

Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat melalui Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Tahun 2025. Rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan pemutakhiran data Neraca Bahan Makanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dan melakukan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal yang merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan perencanaan dan program perencanaan ketahanan pangan. Melalui kegiatan ini, Dinas Ketahanan Pangan berupaya memastikan tersedianya data pangan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi antarsektor, sebagai dasar dalam menganalisis keseimbangan antara produksi, konsumsi, dan distribusi bahan makanan.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan H. Yan Ery, S.Pt., M.Si didampingi Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dan dihadiri oleh para penyuluh se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berikut beberapa dokumentasi dari sub kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan



BADAN
PANGAN
NASIONALNATIONAL
FOOD
AGENCY

➤ Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis

Pada tahun anggaran 2025 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang juga merupakan arahan dari Badan Pangan Nasional sebanyak 4 kali pelaksanaan. Acara ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri serta Natal/Tahun Baru. Gerakan Pangan Murah ini melibatkan sinergi antara Dinas Ketahanan Pangan, TP-PKK Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bank Jambi, Bulog, serta distributor lokal. Tujuan utamanya adalah menstabilkan harga kebutuhan pokok sekaligus memberikan akses kepada masyarakat untuk membeli sembako dengan harga lebih terjangkau.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah sembako dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar. Berikut daftar harga sembako dalam Gerakan Pangan Murah, Beras SPHP (Rp60.000), Gula Pasir (Rp18.000/kg), Minyak Goreng (Rp15.500/liter), Cabe Merah Keriting (Rp23.000/½ kg), Bawang Merah (Rp18.000/½ kg), Bawang Putih (Rp18.000/½ kg), Telur Ayam Ras (Rp15.000/10 butir), Daging Beku: (Rp105.000), makanan olahan mulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000,-

Selain kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM), Dinas Ketahanan Pangan juga melaksanakan kegiatan Pemantauan distribusi dan harga pangan Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional di pasar yang berlokasi di dua Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Bram Itam. Tujuan Pemantauan Harga Pangan yaitu 1) Meningkatkan sistem pemantauan ketersediaan, distribusi, dan harga pangan, 2) Mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta 3) Mengantisipasi gejolak harga pangan.

Berikut beberapa dokumentasi dari kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis :





➤ Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten_Kota

Dinas Ketahanan Pangan melalui Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan melaksanakan Program Kegiatan “Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa (GENIUS)” di 3 lokasi Sekolah Dasar. Program Genius merupakan bentuk upaya Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan dalam mengatasi daerah-daerah rawan pangan, Genius telah dilaksanakan selama 2 tahun berturut-turut pada 6 lokasi berbeda berdasarkan peta kerawanan pangan.

Melalui kegiatan Genius ini diharapkan dapat menambah wawasan melalui edukasi tentang pangan bergizi yang baik untuk siswa. Hal ini dilakukan menindaklanjuti hasil dari peta kerawanan pangan dan kerentanan pangan / FSVA tahun 2024 di wilayah prioritas 1 (satu) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan ini dimulai dengan pemberian sarapan kepada siswa, penyampaian laporan pelaksana kegiatan, sambutan Kepala Sekolah, Sambutan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang makanan bergizi oleh Dinas Kesehatan, dan dilanjutkan dengan pemberian makanan bergizi berupa susu, buah, dan roti serta pelaksanaan lomba mewarnai oleh siswa.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan pemberian edukasi tentang pangan yang mengandung gizi yang dapat mendukung pertumbuhan dan kesehatan siswa. Pada kesempatan tersebut turut hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pihak Kecamatan, serta Ahli Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Pihak Sekolah Dasar.

Pada tahun 2025 kegiatan GENIUS ini dilaksanakan dua kecamatan yaitu Desa Kuala Baru, Kecamatan Seberang Kota, Kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir, dan Desa Mekar Alam, Kec. Seberang Kota. Berikut beberapa dokumentasi dari kegiatan GENIUS ini :





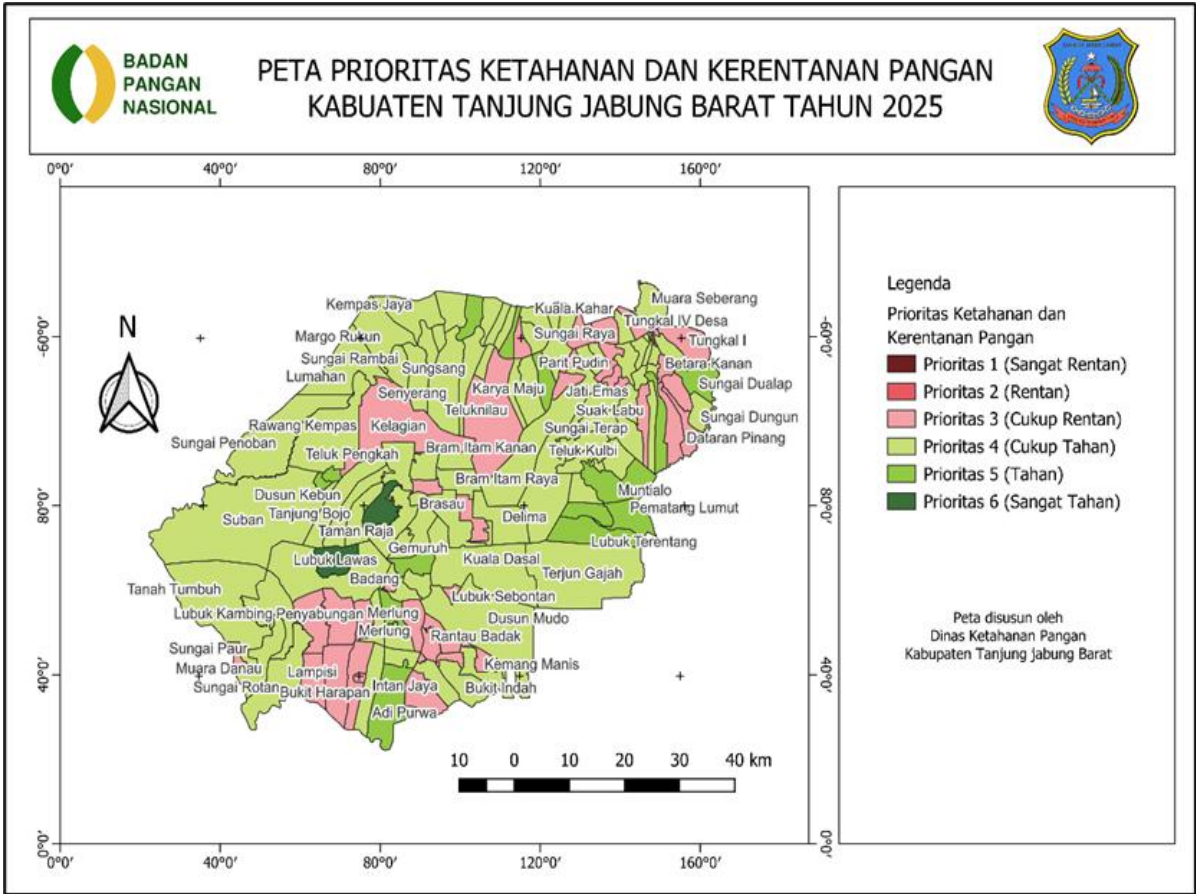
➤ Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas / FSVA) tingkat desa adalah menyediakan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan program, penentuan target serta intervensi kerawanan pangan dan gizi di kabupaten sehingga FSVA dapat menjawab:

- 1. dimana daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan?
(Lokasi Desa se Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dapat dilihat dari Peta Komposit).
- 2. Mengapa daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan

Rasio Luas Lahan Pertanian terhadap Jumlah Penduduk, Rasio Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan terhadap Jumlah Rumah Tangga, Rasio Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah terhadap Jumlah Penduduk Desa, Desa yang tidak memiliki Akses Penghubung Memadai, Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih, Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Kepadatan Penduduk.

Peta FSVA tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibuat berdasarkan hasil perhitungan nilai indeks individu dan komposit. Dengan demikian terdapat 7 peta FSVA, yang terdiri atas 6 Peta Indikator individu dan 1 Peta Indikator komposit.



Dari diagram di atas dapat kita ketahui terdapat 0 Desa atau 0% dari Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk daerah sangat rentan pangan sehingga tidak memerlukan Prioritas Penanganan Tingkat 1 dan Tingkat 2, 38 Desa atau 29% dari Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kategori cukup rentan pangan sehingga memerlukan Prioritas Penanganan Tingkat 3, 79 Desa atau 56% Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kategori cukup tahan pangan sehingga memerlukan Prioritas Penanganan Tingkat 4, 15 Desa atau 10% Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk tahan pangan sehingga memerlukan Penanganan Tingkat 5 dan 2 Desa atau 1% Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk sangat tahan pangan sehingga memerlukan Penanganan Tingkat 6.

Dari hasil analisis dan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan dapat disimpulkan:

- Aspek ketersediaan pangan :
Untuk lahan pertanian tidak terdapat Desa / Kelurahan tidak tersedia / memadai lahan pertanian untuk memproduksi bahan pangan bagi masyarakat Desa / Kelurahan setempat, dan Sarana dan Prasarana sebanyak 2 Desa (1%) Desa / Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap rumah tangga masih belum memadai.
- Aspek keterjangkauan / Akses Pangan :
Tidak terdapat desa/kelurahan penduduk yang tidak sejahteraan Desa / Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan tingkat kesejahteraan terendah dari jumlah penduduk desa tidak perlu penanganan prioritas 1 dan 2 , dan Seluruh Desa / Kelurahan memiliki akses penghubung melalui darat, air maupun udara sehingga tidak ada Desa/Kelurahan yang memerlukan penanganan prioritas 1, 2 maupun 3.
- Aspek Pemanfaatan Pangan :
Terdapat 100% Desa / Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sudah mendapatkan air bersih, dan 28% Desa/Keluarhaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan jumlah tenaga kesehatan masih rendah terhadap jumlah penduduk sehingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya pemanfaatan pangan pada wilayah tersebut.

3. Analisis Terhadap Faktor Hambatan, Faktor Keberhasilan dan Solusi

Tabel 3.9 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Analisis	Solusi
1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan serta penanganan kerawanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	67,00	76,02	113,46%	Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah untuk membantu ketersediaan dan distribusi bahan pangan ke masyarakat	Pelaksanaan Kegiatan yang Mendukung Stabilisasi Harga Komoditas Pangan

Untuk indikator Sasaran 2 (dua) berupa Skor Pola Pangan Harapan (PPH) **Ketersediaan** tingkat capaiannya 113,46 %, walaupun realisasi tercapai tetapi terlihat bahwa skor pola pangan harapan ketersediaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat rendah dibandingkan dengan skor pola pangan harapan konsumsi masyarakat itu sendiri yang artinya Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dari produksi lokal. Oleh karena itu Potensi produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan dan perikanan harus segera dioptimalkan lagi oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Meski demikian masih ada beberapa komoditi pangan strategis yang diperoleh dari luar daerah seperti tepung terigu, tepung gandum, gula pasir, kacang kedelai, kentang, daging ayam kampung, susu sapi, telur ayam kampung, serta minyak goreng. Pangan strategis yang tidak dapat di produksi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau produksinya rendah ini perlu dijaga kestabilan pasokan pangannya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu menjamin dan menjaga pasokan pangan strategis yang stabil dari berbagai daerah sekitar.

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Sasaran Strategis

Tabel 3.10 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Anggaran) Sasaran 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan serta penanganan kerawanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	67,00	76,02	113,46%	469.796.200	432.358.000	92,03 %	123,28

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara capaian kinerja dan anggaran, maka dapat dilihat pada tabel diatas bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja Indikator **Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan** dengan capaian kinerja 113,46 % dan capaian anggaran 92,03% menunjukan tingkat efisiensi anggaran sebesar 123,28 % dengan capaian kinerja yang sudah mencapai target yang ditentukan yaitu baik.

Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	32 %	28 %		Menunjang
Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan	1 Peta	1 Peta	100	Menunjang
Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan Prioritas 1,2,3 Peta FSVA	42 desa	38 desa		Menunjang
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi masyarakat	94,00	93,18	99,12	Menunjang
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pangan Pokok (Beras) yang Disalurkan sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten (ton)	300 ton	305 ton	101	Menunjang

Sasaran 2 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan serta penanganan kerawanan pangan, Dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan, ditunjang dengan program :

- a) **Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, dengan kegiatan yang menunjang kinerja program yaitu *Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan*.
Dalam kegiatan ini terdapat indikator Jumlah Pangan Pokok (Beras) yang Disalurkan sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten (ton) dengan target 300 ton telah terealisasi 305 ton atau rata2 persentase target kegiatan tercapai diatas 101 % sangat mendukung terlaksananya ketersediaan pangan.

Indikator kinerja kegiatan tersebut diatas didukung oleh 3 Sub kegiatan yaitu :

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya, dengan pagu anggaran Rp. 26.363.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 26.362.850,-
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan, dan Harga Pangan Pokok Strategis, dengan pagu anggaran 127.290.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 117.289.850,-
- Penyusunan Neraca Bahan Makanan, dengan pagu anggaran Rp. 48.794.200,-dengan realisasi anggaran Rp. 35.457.200,-

b) **Program Penanganan Kerawanan Pangan**, dengan 2 kegiatan yang menunjang kinerja program yaitu

➤ *Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan*

Dalam kegiatan ini terdapat indikator Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan dengan target 1 peta telah terealisasi 1 peta.

Indikator kinerja kegiatan tersebut diatas didukung oleh Sub kegiatan yaitu Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, dengan pagu anggaran Rp. 63.038.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 41.638.000,-

➤ *Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota*

Dalam kegiatan ini terdapat indikator Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan Prioritas 1,2,3 Peta FSVA dengan target 42 desa terealisasi hanya 38 desa.

Indikator kinerja kegiatan tersebut diatas didukung oleh Sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran Rp. 214.311.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 211.610.100,-

SASARAN STRATEGIS 3 : MENINGKATNYA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

1. *Perbandingan Capaian/ Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 Terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya*

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja Renstra 2024	Realisasi				2025			Target Akhir Renstra 2029
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (%)	100	-	-	78,04	115	100	73,25	73,25	100

2. *Analisis Capaian Kinerja*

2.1 *Perbandingan Target dan Kinerja Tahun Ini*

Keberadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memiliki peranan strategis dalam penyediaan pangan, khususnya di tengah kejadian bencana. Dalam kondisi darurat bencana, proses penyaluran CPPD lebih ringkas karena bantuan pangan dapat langsung diberikan kepada masyarakat terdampak melalui instruksi pimpinan daerah. Pemanfaatan Cadangan Pangan Beras Pemerintah Kabupaten digunakan untuk :

- a. Kerawanan pangan pasca bencana alam dan atau keadaan darurat.

- b. Perubahan gejala harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 10% dari harga normal selama paling sedikit 1 (satu) minggu).
- c. Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana.
- d. Rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah cadangan pangan yang dikuasai Pemerintah Daerah (CPPD) yang dititipkan di Perum BULOG Sub Divre Kuala Tungkal. Pada tahun 2025 stok awal CPPD di Bulan Januari 2025 sebanyak 26,544 ton beras dan di Bulan Juni 2025 ada penambahan CPPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 6,6 ton beras setelah itu di Bulan November 2025 ada penambahan kembali beras CPPD sebanyak 5 ton Beras. Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah cadangan pangan yang dikuasai Pemerintah Daerah (CPPD) yang dititipkan di Perum BULOG Sub Divre Kuala Tungkal Per Desember tahun 2025 adalah 38,144 ton beras.

Penetapan jumlah cadangan pangan Beras Pemerintah untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 menurut Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 sebesar 52,07 ton beras. Jadi persentase jumlah cadangan beras Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 adalah sebesar 73,255 %

$$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota Yang ditetapkan}} \times 100\%$$

$$\frac{38,144}{52,07} \times 100\% = 73,255 \%$$

2.2 Perbandingan Realisasi Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir

Dalam kondisi darurat bencana, proses penyaluran CPPD lebih ringkas karena bantuan pangan dapat langsung diberikan kepada masyarakat terdampak melalui instruksi pimpinan daerah. Keberadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memiliki peranan strategis dalam penyediaan pangan, khususnya di tengah kejadian bencana yang sering terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan tabel realisasi diatas tadi, bahwa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selalu dalam kondisi tersedia walaupun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ada fluktuasi yang terutama disebabkan oleh banyak sedikitnya jumlah penyaluran beras Cadangan Pangan ke lokasi bencana. dan mampu berperan dalam penyediaan pangan terutama pasca bencana yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dukungan dana APBD Kabupaten sangat diharapkan agar setiap tahun Dinas Ketahanan Pangan dapat mengadakan Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Perum BULOG.

2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Untuk perbandingan realisasi capaian persentase jumlah cadangan kabupaten tahun 2025 ini dibanding dengan target pada akhir periode Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Cadangan Pangan Kabupaten tahun 2025 dengan target Akhir Renstra tahun 2029

Uraian	2025		2029
	Target	Realisasi	Target
Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	100%	73,25 %	100 %

Sumber : BULOG diolah Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat

Ditahun 2025 Penetapan jumlah cadangan pangan Beras Pemerintah untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 menurut Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 sebesar 52,07 ton beras. Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah cadangan pangan yang dikuasai Pemerintah Daerah (CPPD) yang dititipkan di Perum BULOG Sub Divre Kuala Tungkal Per Desember tahun 2025 adalah 38,144 ton beras Jadi persentase jumlah cadangan beras Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 adalah sebesar 73,255 %. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2029 masih ada kekurangan sebesar 26 % yang akan diprioritaskan untuk dipenuhi agar stok beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tidak kosong.

Untuk menghindari kekosongan stok beras CPPD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, diharapkan setiap tahun anggaran dapat dianggarkan untuk penambahan beras CPPD sesuai dengan Surat Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah dari Gubernur Provinsi Jambi. Upaya yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut pemecahan permasalahan yaitu tersedianya anggaran pemerintah daerah dari APBD II melalui Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat Bidang distribusi dan cadangan pangan untuk pengadaan beras CPPD yang bekerjasama dengan Perum BULOG Sub Divre Kuala Tungkal. Untuk APBD Murni tahun anggaran 2026, Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah belum dianggarkan karena adanya efisiensi TKDD dan diharapkan pada APBD Perubahan TA 2026 nanti anggaran pengadaan beras CPPD akan diusulkan kembali.

2.4 Analisis Capaian Kinerja Program Pendukung Pencapaian Indikator Sasaran Strategis

Adapun sub kegiatan yang menjadi pendukung dalam pencapaian target jumlah cadangan pangan pada tahun anggaran 2025 yaitu :

- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, pada tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah daerah sebesar 11,563 ton beras yang dikeluarkan ke beberapa lokasi pasca bencana alam maupun bencana kebakaran.

Berikut beberapa dokumentasi dari kegiatan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan pemeliharaan/ penyaluran cadangan pangan pemerintah



3. Analisis Terhadap Faktor Hambatan, Faktor Keberhasilan dan Solusi

Tabel 3.12 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Analisis	Solusi
1	Meningkatnya cadangan pangan pemerintah daerah	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (%)	100 %	73,25 %	73,25 %	-	Dukungan dana APBD Kabupaten dalam pengadaan beras untuk Cadangan Pangan

Untuk indikator Sasaran 3 (tiga) berupa Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tingkat capaiannya 73,25%. Pada tahun anggaran 2025, Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan pengadaan Beras CPPD sebanyak 11,6 ton dan selama tahun 2025 juga Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan beras CPPD sebanyak 11,563 ton beras karena adanya kejadian bencana. Dukungan dana APBD Kabupaten sangat diharapkan agar setiap tahun Dinas Ketahanan Pangan dapat mengadakan Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BULOG.

Faktor keberhasilan dalam mendukung tercapainya target ditahun 2025 antara lain adalah:

- ✓ Dukungan Regulasi: Keberadaan peraturan bupati yang memberikan payung hukum dan alokasi anggaran APBD untuk pengadaan CPPD.
- ✓ Sinergi Antar Instansi: Komunikasi yang baik antara Dinas Ketahanan Pangan dengan lembaga terkait seperti Bulog dan kelompok tani dalam pengelolaan dan distribusi cadangan

Faktor yang mungkin menghambat dalam mendukung tercapainya target ditahun 2025 antara lain adalah:

- ✓ Keterbatasan Anggaran: Dana dari APBD yang terbatas seringkali menjadi kendala dalam mengoptimalkan volume pembelian dan pemeliharaan stok cadangan pangan.
- ✓ Aturan Distribusi Belum Jelas: Belum adanya regulasi spesifik mengenai biaya angkut dari gudang penyimpanan ke lokasi pembagian (titik bagi) yang sering menimbulkan kendala operasional.

Beberapa solusi yang mungkin dapat dilakukan untuk meningkatkan cadangan pangan pemerintah daerah yaitu :

- ✓ Penyusunan Perkada Spesifik: Menerbitkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur detail mekanisme pengadaan, batas harga beli, hingga biaya distribusi logistik sampai ke titik bagi.
- ✓ Formulasi Kebutuhan Riil: Menerapkan formula perhitungan kebutuhan pangan berbasis jumlah penduduk, angka konsumsi per kapita, dan tingkat risiko bencana wilayah secara akurat.
- ✓ Sistem Pengadaan Bertahap (Multi-years): Membagi target volume cadangan pangan ke dalam beberapa tahun anggaran APBD untuk menyiasati keterbatasan dana.

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Sasaran Strategis

Tabel 3.13 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Anggaran) Sasaran 3

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya cadangan pangan pemerintah daerah	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (%)	100 %	73,25 %	73,25 %	216.691.200	195.450.814	90,19 %	81,21

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara capaian kinerja dan anggaran, maka dapat dilihat pada tabel diatas bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja Indikator Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten dengan capaian kinerja 73,25 % dan capaian anggaran 90,19 % menunjukkan tingkat efisiensi anggaran sebesar 81,21 % dengan capaian kinerja yang sudah mencapai target yang ditentukan.

Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi masyarakat	94,00	93,18	99,12	Menunjang
Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah tonase pengadaan beras cadangan pangan kabupaten	6,6 ton	11,6 ton	175	Menunjang

Sasaran 3 : Meningkatkan cadangan pangan pemerintah daerah, Dengan indikator Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (%),

ditunjang dengan program :

a) **Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, dengan kegiatan yang menunjang kinerja program yaitu *Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota*.

Dalam kegiatan ini terdapat indikator Jumlah tonase pengadaan beras cadangan pangan kabupaten, dengan target 6,6 ton beras telah terealisasi 11,6 ton beras.

Indikator kinerja kegiatan tersebut diatas didukung oleh 3 Sub kegiatan yaitu :

- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah, dengan pagu anggaran Rp. 165.800.000,- dengan realisasi anggaran 160.019.114,-
- Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah, dengan pagu anggaran Rp. 20,940,000,- dengan realisasi anggaran Rp. 12.335.500,-
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal dengan pagu anggaran Rp. 29.951.200,- dengan realisasi anggaran Rp. 23.096.200,-

SASARAN STRATEGIS 4 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH

1. Perbandingan Capaian/ Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 Terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja Renstra 2024	Realisasi				2025			Target Akhir Renstra 2029
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai AKIP OPD	67,52	-	65,47	66,17	67,52	75,00	75,90	101,2	80,00
2	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80,04	-	80,39	83,11	80,04	81,00	81,25	100,3	88,00

2. Analisis Capaian Kinerja

2.1 Perbandingan Target dan Kinerja Tahun Ini

Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban Perangkat Daerah atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atau sering pula disebut Sistem AKIP merupakan sebuah sistem perencanaan kinerja yang membentuk siklus penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai dan tercantum dalam perencanaan strategis organisasi.

Proses tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam perencanaan kinerja tahunan, untuk kemudian ditetapkan dalam penetapan kinerja, penetapan pengukuran kinerja, pengumpulan data penilaian kinerja, analisis, review dan pelaporan kinerja serta penggunaan data kinerja tersebut bagi perbaikan kinerja organisasi di periode berikutnya. nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan hasil penilaian inspektorat tahun 2025 mendapat nilai 75,90 atau kategori BB. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat 2/3 unit kerja gambaran AKIP sangat baik, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon/koordinator dengan rincian penilaian sebagai berikut :

No	Komponen	Total Bobot (%)	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30	23,01
2	Pengukuran Kinerja	30	21,66
3	Pelaporan Kinerja	15	12,23
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,00
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	75,90

Sumber Inspektorat 2025

Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan oleh inspektorat dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun dokumen perencanaan yang lebih menantang dengan standar yang baik, menggambarkan penetapan pencapaian target yang realistis dan peningkatan capaian kinerja yang maksimal.

- b) Lebih memperhatikan dan melakukan pemantauan hasil capaian kinerja setiap individu yang dapat memberikan informasi secara luas hingga ketingkat staf dibawahnya secara berjenjang.
- c) Menyampaikan laporan kinerja yang lebih berkualitas, akuntabel, tepat waktu, dan memberikan gambaran yang jelas atas kinerja yang telah dicapai.
- d) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisa data kinerja , serta menyajikan analisa secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi.
- e) Memastikan rekomendasi hasil evaluasi AKIP ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

Nilai SKM Dinas Ketahanan Pangan

a. Deskripsi Responden

Formulir survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik di Dinas Ketahanan Pangan telah diisi oleh 66 responden dengan latar belakang sosial yang bervariasi. Survei ini dirancang untuk memperoleh gambaran utuh mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Ketahanan Pangan, melibatkan responden yang mencerminkan keberagaman dalam aspek jenis kelamin, pendidikan, hingga pekerjaan. Dari segi distribusi jenis kelamin, tercatat sebanyak 30 responden laki-laki dan 36 responden perempuan yang berpartisipasi. Komposisi ini menunjukkan partisipasi perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki, serta menandakan bahwa survei berhasil mengakomodasi suara kedua gender secara proporsional.

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas responden adalah lulusan S1 sebanyak 38 orang, diikuti oleh lulusan SMA sebanyak 27 orang, dan hanya 1 responden yang merupakan lulusan S2. Variasi ini memperlihatkan bahwa survei melibatkan peserta dari beragam jenjang pendidikan, mulai dari menengah atas hingga perguruan tinggi, sehingga perspektif yang diperoleh menjadi lebih luas dan representatif.

Dilihat dari jenis pekerjaan, responden didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 29 orang. Selain itu, terdapat 11 orang dari kategori pekerjaan lainnya, 8 petani, 6 pelajar/mahasiswa, 5 pegawai swasta, 4 wirausaha, dan 3 honorer. Keberagaman profesi ini mencerminkan bahwa survei IKM Dinas Ketahanan Pangan mampu menjangkau perwakilan dari berbagai sektor pekerjaan yang ada di masyarakat.

Tabel Responden IKM Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan jenis kelamin

	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Unit Dinas Ketahanan Pangan	30	36	66

Tabel. Responden IKM Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Pendidikan

	Pendidikan			Total
	SMA	S1	S2	
Unit Dinas Ketahanan Pangan	27	38	1	66

Tabel Responden IKM Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Pekerjaan

	Pekerjaan							Total
	LAINNYA	ASN	SWASTA	WIRAUSAHA	HONORER	PETANI	PELAJAR/MHS	
Unit Dinas Ketahanan Pangan	11	29	5	4	3	8	6	38

b. Evaluasi Unsur

Hasil evaluasi terhadap unsur-unsur pelayanan publik menunjukkan bahwa sebagian besar unsur memperoleh penilaian kategori baik. Unsur persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, serta pengaduan, saran, dan masukan memperoleh NRR yang berkisar antara 3,17 hingga 3,48, menempatkannya dalam kategori baik. Sementara itu, unsur biaya/tarif menonjol dengan NRR 3,70 dan masuk dalam kategori sangat baik, menjadi salah satu kekuatan dalam pelayanan Dinas Ketahanan Pangan. Namun, unsur sarana dan prasarana mendapat perhatian khusus karena hanya memperoleh NRR 3,03 atau kategori kurang baik, sehingga perlu adanya peningkatan fasilitas penunjang pelayanan.

Tabel 3.14 Evaluasi unsur IKM Dinas Ketahanan Pangan

No	Unsur Pelayanan	NRR	NRR x 25	Keterangan
U1	Persyaratan	3,26	81,44	Baik
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,24	81,06	Baik
U3	Waktu Penyelesaian	3,17	79,17	Baik
U4	Biaya/tarif	3,70	92,42	Sangat Baik
U5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3,21	80,30	Baik
U6	Kompetensi pelaksana	3,23	80,68	Baik
U7	Perilaku pelaksana	3,23	80,68	Baik
U8	Sarana dan Prasarana	3,03	75,76	Kurang Baik
U9	Pengaduan, sarana dan masukan	3,48	87,12	Baik

Menganalisis data lebih lanjut, dapat direkomendasikan agar Dinas Ketahanan Pangan mempertahankan keunggulan pada unsur biaya/tarif yang telah dinilai sangat baik, sekaligus melakukan inovasi dan upaya perbaikan berkelanjutan pada unsur-unsur lain, terutama sarana dan prasarana. Peningkatan kualitas pada aspek-aspek tersebut diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang semakin optimal dan memuaskan masyarakat.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Dinas Ketahanan Pangan diperoleh dari akumulasi nilai rata-rata unsur (NRR) tertimbang sebesar 3,25. Setelah proses konversi, nilai tersebut menjadi 81,25 yang menempatkan unit pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dalam kategori baik. Dengan capaian ini, dapat disimpulkan bahwa layanan yang diberikan secara umum telah memenuhi ekspektasi masyarakat, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya pada aspek sarana dan prasarana.

Tabel 3.15. IKM Dinas Ketahanan Pangan

No	Unsur Pelayanan	NRR	NRR Tertimbang (NRR x 0,11)
U1	Persyaratan	3,26	0,36
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,24	0,36
U3	Waktu Penyelesaian	3,17	0,35
U4	Biaya/tarif	3,70	0,41
U5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3,21	0,35
U6	Kompetensi pelaksana	3,23	0,36
U7	Perilaku pelaksana	3,23	0,36
U8	Sarana dan Prasarana	3,03	0,33
U9	Pengaduan, sarana dan masukan	3,48	0,38
Nilai Indeks (NI)			3,25
Nilai Indeks setelah konversi			81,25
Kinerja Unit Pelayanan			Baik

2.2 Perbandingan Realisasi Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir

Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan hasil penilaian inspektorat tahun 2022 sampai dengan 2025 menunjukkan tren meningkat tiap tahunnya mendapat nilai 75,90 atau kategori BB. Nilai ini ada peningkatan dibanding penilaian tahun 2024 yang lalu. Dengan adanya evaluasi tersebut, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat berharap agar kinerja perangkat daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat lebih ditingkatkan. Proses tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam perencanaan kinerja tahunan, untuk kemudian ditetapkan dalam penetapan kinerja, penetapan pengukuran kinerja, pengumpulan data penilaian kinerja, analisis, review dan pelaporan kinerja serta penggunaan data kinerja tersebut bagi perbaikan kinerja organisasi di periode berikutnya. Hasil evaluasi tahun 2025 menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat 2/3 unit kerja gambaran AKIP sangat baik, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon/koordinator sesuai dengan hasil rekomendasi dari tim Inspektorat agar nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan dapat mencapai target yang telah ditetapkan didalam dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Periode 2025-2029.

Nilai SKM Dinas Ketahanan Pangan

Dari tabel diatas terlihat bahwa target tahunan dari Survei Kepuasan Masyarakat dapat mencapai target Renstra yang telah ditetapkan, walaupun secara umum masih fluktuatif. Hasil survei kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Ketahanan Pangan merekomendasikan bahwa meskipun banyak unsur pelayanan di Dinas Ketahanan Pangan telah dinilai baik, unsur-unsur pelayanan tersebut perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan agar menjadi sangat baik. Hal tersebut agar unsur-unsur itu bisa mencapai nilai sangat baik sebagaimana unsur biaya/tarif. Sementara itu, unsur sarana dan prasarana mendesak untuk ditingkatkan agar menjadi sangat baik atau setidaknya baik. Oleh karena itu Dinas Ketahanan Pangan terus berkomitmen apa yang menjadi rekomendasi dari hasil survei akan menjadi pedoman dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat umumnya

2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Uraian	2025		2029
	Target	Realisasi	Target
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Ketahanan Pangan	75,00	75,90	80,00
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Dinas Ketahanan Pangan	81,00	81,25	88,00

Sumber : Inspektorat dan Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjab Barat, 2025

Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan

Sesuai dengan Hasil evaluasi tahun 2025 dari tim Inspektorat menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat 2/3 unit kerja gambaran AKIP sangat baik, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon/koordinator sesuai dengan hasil rekomendasi dari tim Inspektorat agar nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan dapat mencapai target yang telah ditetapkan didalam dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Periode 2025-2029.

Untuk mencapai target nilai AKIP sampai pada periode akhir Renstra 2025-2029, Dinas Ketahanan Pangan akan berusaha mengikuti rekomendasi dari tim Inspektorat untuk (1) Menyusun dokumen perencanaan yang lebih menantang dengan standar yang baik, menggambarkan penetapan pencapaian target yang realistis dan peningkatan capaian kinerja yang maksimal, (2) Dinas Ketahanan Pangan juga akan Menyampaikan laporan kinerja yang lebih berkualitas, akuntabel, tepat waktu dan memberikan gambaran yang jelas atas kinerja yang telah dicapai., serta (3) akan Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian / tidak tercapainya kinerja organisasi.

Nilai SKM Dinas Ketahanan Pangan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Hasil akumulasi Nilai Rata-rata (NRR) Tertimbang dan Nilai Indeks pelayanan publik di Unit Dinas Ketahanan Pangan terdapat enam unsur pelayanan dinilai baik, dan satu unsur dinilai kurang baik oleh masyarakat. Setelah akumulasi Nilai Rata-Rata Tertimbang, Nilai Indeks Pelayanan sebesar 3,25 dan setelah konversi menjadi 81,25. Kinerja pelayanan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dinilai **“BAIK”** oleh masyarakat yang telah mendapat pelayanan di Dinas Ketahanan Pangan.

Capaian realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat ditahun 2025 masih jauh dari target nilai di akhir periode renstra 2029 sebesar 6,75 poin. Meskipun banyak unsur pelayanan di Dinas Ketahanan Pangan telah dinilai baik, unsur-unsur pelayanan tersebut perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan agar menjadi sangat baik. Hal tersebut agar unsur-unsur itu bisa mencapai nilai sangat baik sebagaimana unsur biaya/tarif. Sementara itu, unsur sarana dan prasarana kantor yang mendapat penilaian kurang baik dari masyarakat mendesak untuk ditingkatkan agar menjadi sangat baik atau setidaknya baik sehingga target akhir dari Renstra dapat tercapai ataupun mendekati.

3. Analisis Terhadap Faktor Hambatan, Faktor Keberhasilan dan Solusi

Tabel 3.16 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Sasaran 4

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Analisis	Solusi
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah	Nilai AKIP OPD	75,00	75,90	101,2 %	Terdapat peningkatan capaian kinerja	-
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	81,00	81,25	100,3 %	Terdapat peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat	-

Untuk indikator Sasaran 4 (empat) berupa a. Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan tingkat capaiannya adalah 101,2 % arena adanya peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Peningkatan capaian kinerja ini berupa kelengkapan data yang semakin baik dan peningkatan kualitas dokumen yang dihasilkan, dan b. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Dinas Ketahanan Pangan, tingkat capaiannya kinerjanya adalah 100,1 % karena adanya peningkatan kualitas dalam melayani masyarakat. Walaupun dua indikator ini tercapai,tetapi Dinas Ketahanan Pangan terus berkomitmen untuk meningkatkan capaian nilai SAKIP dan SKM tiap tahunnya.

Faktor keberhasilan dalam mendukung tercapainya target ditahun 2025 antara lain adalah:

Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan

- ✓ Perencanaan Kinerja ; Dinas Ketahanan Pangan telah menyusun Renstra yang mengacu pada RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja, Renja, IKU, dan dokumen perencanaan lainnya
- ✓ Pengukuran Kinerja ; Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja dan telah memiliki rencana aksi untuk pencapaian kinerja.
- ✓ Pelaporan Kinerja ; Dinas Ketahanan Pangan telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja yang telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya
- ✓ Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal ; Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan menindaklanjuti atas rekomendasi dari hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya.

Nilai SKM Dinas Ketahanan Pangan

- ✓ Formulir survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik di Dinas Ketahanan Pangan telah diisi oleh 66 responden dengan latar belakang sosial yang bervariasi. Survei ini dirancang untuk memperoleh gambaran utuh mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Ketahanan Pangan, melibatkan responden yang mencerminkan keberagaman dalam aspek jenis kelamin, pendidikan, hingga pekerjaan.
- ✓ Hasil evaluasi terhadap unsur-unsur pelayanan publik menunjukkan bahwa sebagian besar unsur memperoleh penilaian kategori baik. Unsur persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, serta pengaduan, saran, dan masukan memperoleh NRR yang berkisar antara 3,17 hingga 3,48, menempatkannya dalam kategori baik. Sementara itu, unsur biaya/tarif menonjol dengan NRR 3,70 dan masuk dalam kategori sangat baik, menjadi salah satu kekuatan dalam pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Beberapa solusi yang mungkin dapat dilakukan untuk meningkatkan Nilai AKIP dan SKM Dinas Ketahanan Pangan yaitu :

Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan

- ✓ Menyusun dokumen perencanaan yang lebih menantang dengan standar yang lebih baik.
- ✓ Lebih memperhatikan dan melakukan pemantauan hasil capaian kinerja setiap individu secara berjenjang.
- ✓ Menyampaikan laporan kinerja yang lebih berkualitas, akuntabel, dan tepat waktu.
- ✓ Memastikan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP ditindaklanjuti dan dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan

Nilai SKM Dinas Ketahanan Pangan

- ✓ Menyusun Dinas Ketahanan Pangan mempertahankan keunggulan pada unsur biaya/tarif yang telah dinilai sangat baik, sekaligus melakukan inovasi dan upaya perbaikan berkelanjutan pada unsur-unsur lain, terutama sarana dan prasarana. Peningkatan kualitas pada aspek-aspek tersebut diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang semakin optimal dan memuaskan masyarakat

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Sasaran Strategis 4

Program dan Kegiatan penunjang dalam pencapaian perjanjian kinerja tahun 2025, adalah *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 3.17 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Anggaran) Sasaran 4

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah	Nilai AKIP OPD	75,00	75,90	101,2 %	4.060.601.845	3.500.024.641	87 %	115,80
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	81,00	81,25	100,3 %				

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara capaian kinerja dan anggaran, maka dapat dilihat pada tabel diatas bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja Indikator **Nilai AKIP OPD dan Nilai SKM Dinas Ketahanan Pangan** dengan capaian kinerja 100,75 % dan capaian anggaran 87 % menunjukan tingkat efisiensi anggaran sebesar 115,80 % dengan capaian kinerja yang sudah mencapai target yang ditentukan.

Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP (%) Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	100 %	100 %	100	Menunjang
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja DKP	6 Dokumen	6 Dokumen	100	Menunjang
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan tahunan OPD yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100	Menunjang
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan	100 %	100 %	100	Menunjang
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan	100 %	100 %	100	Menunjang
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan OPD	11 Unit	11 Unit	100	Menunjang
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang pada Dinas Ketahanan Pangan	100 %	100 %	100	Menunjang
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD Dinas Ketahanan Pangan	100 %	100 %	100	Menunjang

Sasaran 4 : *Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah*, Dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Nilai SKM Dinas Ketahanan Pangan, ditunjang dengan program :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan kegiatan yang menunjang kinerja program yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Target dari kegiatan-kegiatan yang mendukung program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten ini Berhasil tercapai 100% dari target karena telah dilaksanakan dengan baik melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2025, didukung APBD sebesar Rp. 5.063.462.565,- (Lima Milyar Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi, sebesar Rp. 4.926.354.565,- digunakan untuk :
 - Belanja Pegawai Rp. 2.873.369.645,-
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.850.087.200,-
 - Belanja Hibah Rp. 202.897.720,-
- b. Belanja Modal, sebesar Rp. 137.108.000,- digunakan untuk:
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 96.548.000,-
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 40.560.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18 Ringkasan Penggunaan Anggaran Tahun 2025

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten				
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.225.000	34.779.050	2.445.950
2		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.873.369.645	2.429.185.273	444.184.372
3		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	158.840.000	150.250.000	8.590.000
4		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27.750.000	27.750.000	-
5		Pendataan Dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	2.475.000	2.475.000	-
6		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3.036.000	3.036.000	-
7		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.424.000	58.127.814	296.186
8		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.995.000	2.850.000	2.145.000
9		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.630.000	16.000.000	10.630.000
10		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.026.000	151.610.960	5.415.040
11		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.308.000	92.685.000	1.623.000
12		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	-
13		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.500.000	20.648.702	25.851.298
14		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	259.783.200	219.605.988	40.177.212
15		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	248.530.000	201.228.692	47.301.308
16		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.650.000	19.085.000	565.000
17		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	40.560.000	40.468.162	91.838

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa
B	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat				
19		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	26.363.000	26.362.850	150
20		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	127.290.000	117.289.850	10.000.150
21		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	48.794.200	35.457.200	13.337.000
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	29.951.200	23.096.200	6.855.000
22		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	165.800.000	160.019.114	5.780.886
23		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah	20.940.000	12.335.500	8.604.500
24		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	22.536.000	18.358.050	4.177.950
25		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	255.807.320	246.644.780	9.162.540
C	Program Penanganan Kerawanan Pangan				
26		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	63.038.000	41.638.000	21.400.000
27		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	214.311.000	211.610.100	2.700.900
D	Program Pengawasan Keamanan Pangan				
28		Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	11.500.000	1.499.600	400
29		Koordinasi dan Sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	16.530.000	14.344.700	2.185.300

Apabila ditinjau dari sisi penyerapan, anggaran sebesar Rp. 5.063.462.565,- terserap Rp.4.389.941.585 (87 %). Sisa anggaran Rp. 673.520.980- (13 %) diantaranya berasal dari:

- a) Sisa gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp 444.184.372,-
- b) Sisa optimalisasi barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp. 10.630.000,-
- c) Sisa optimalisasi belanja percetakan kantor sebesar Rp. 6.189.800,-
- d) Sisa pembayaran listrik air telfon sebesar Rp 25.851.298,-
- e) Sisa pembayaran pajak, bea, perizinan kendaraan dinas sebesar Rp. 47.301.308,-
- f) Sisa pembayaran jasa pelayanan umum kantor sebesar Rp. 40.177.212,-
- g) Sisa Optimalisasi kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Rp. 10.000.150,-
- h) Sisa Optimalisasi kegiatan Penyusunan Pemuktahiran Dan Analisis Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan sebesar Rp. 21.400.000,-
- i) Sisa Optimalisasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Berbasis Sumber Daya Lokal sebesar Rp. 9.162.540,-

Realisasi serapan anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar 87 % dalam menunjang pencapaian sasaran kinerja tahun 2025. Masih besarnya pengembalian Sisa lebih penggunaan anggaran ini disebabkan oleh terlambatnya proses pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilakukan proses pencairan. Diharapkan untuk tahun 2026 ini pelaksanaan realisasi keuangan di Dinas Ketahanan Pangan dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak bertumpuk di triwulan akhir. Sedangkan untuk realisasi fisik kinerja pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan sehingga tercapai sebesar 94%.

Capaian Kinerja Lainnya

a. Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dengan Klasifikasi BAIK

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) mendapatkan apresiasi dalam upaya dan komitmen peningkatan kualitas keanekaragaman konsumsi pangan melalui capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten/Kota Tahun 2025 dari Badan Pangan Nasional. Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dari semua pihak, dari lini atas hingga masyarakat itu sendiri. Kolaborasi bersama semua stakeholder terkait tak ketinggalan Kelompok Wanita Tani (KWT) dan PKK Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terus bergerak dari lini bawah.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan ialah memastikan masyarakat memiliki akses pangan yang cukup, merata dan terjangkau melalui berbagai program pelayanan sehingga masyarakat Kabupaten Tanjung jabung Barat memperoleh pangan yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) agar masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.

Dengan adanya penghargaan dari Badan pangan Nasional ini dapat meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan stakeholder terkait lainnya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pangan yang beredar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



b. Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Raih Penghargaan Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar Tahun 2025 dengan Predikat "C" (Cukup). Penghargaan ini merupakan Jawaban terhadap Tekad dan Semangat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan dalam memberikan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong semangat untuk meningkatkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan khususnya Pangan Segar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sertavmampu memotivasi Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan Tugas Pembinaan dan Pengawasan khususnya mendukung Program Prioritas Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pangan Segar yang akan dikonsumsi oleh Masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dari Dinas Ketahanan Pangan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dapat dicapai, meskipun capaian tersebut belum sepenuhnya 100 %, hal ini menunjukkan adanya komitmen peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan uraian Capaian Kinerja Sasaran yang merupakan Capaian Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Capaian kinerja sasaran 1 Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan keamanan pangan segar tercapai sebesar 99,18 % atau kategori Sangat Baik.
- b) Capaian kinerja sasaran 2 Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Keterjangkauan Pangan serta Penanganan Kerawanan Pangan tercapai sebesar 113,46 % atau kategori Sangat Baik.
- c) Capaian kinerja sasaran 3 Meningkatnya cadangan pangan pemerintah daerah tercapai sebesar 95,46 % atau kategori Sangat Baik.
- d) Capaian kinerja sasaran 4 Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan, dan akuntabilitas kinerja tercapai sebesar 101,2% dan 100,31 % atau kategori Sangat Baik.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 ini kami laporkan. Sebagai akhir kata kami beserta segenap Staf Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengharapkan LKj Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada masyarakat dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang

Kuala Tungkal, 18 Februari 2026

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



HAPRIANSYAH, S. S. Pi
NIP. 198012252009041002